

PENDAFTARAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA PADANG

**(Nama: Nessa Fajriyana Farda, : 1021211036, Program Magister Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 173 + xii halaman, 2013)**

ABSTRAK

Aset merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, aset juga menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menilai Laporan Keuangan. Selama 4 (empat) tahun terakhir, Pemerintah Kota Padang selalu memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan Keuangannya dan permasalahan administrasi aset, khususnya tanah dalam bentuk pensertipikatan selalu menjadi temuan oleh BPK. Demikian pentingnya kegunaan aset, maka Pemerintah Kota Padang perlu melakukan upaya untuk meningkatkan status tanah dari yang belum bersertipikat menjadi bersertipikat dengan melakukan pendaftaran tanah. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah Bagaimana kondisi fisik dan yuridis tanah aset Pemerintah Kota Padang saat ini, Bagaimana proses pendaftaran tanah aset Pemerintah Kota Padang, dan Bagaimana dukungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang terhadap pendaftaran tanah aset Pemko. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian menerangkan dan memaparkan obyek yang diteliti secara obyektif tentang pelaksanaan pendaftaran tanah aset Pemerintah Kota Padang. Sebagai penelitian hukum, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Artinya, penelitian ini melihat bagaimana kenyataan yang ada dalam pelaksanaan pendaftaran tanah aset Pemerintah Kota Padang dan kemudian dihubungkan dengan teori-teori ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data dikumpulkan dengan studi dokumentasi dan wawancara, serta dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kondisi fisik dan yuridis tanah aset Pemerintah Kota Padang saat ini masih belum jelas. Hal ini dikarenakan banyaknya tanah aset yang tidak memiliki dokumen-dokumen pendukung akan status tanah yang akan didaftar. Berita acara mengenai pelepasan atau penyerahan tanah dari masyarakat baik secara hibah dan wakaf tidak lengkap dan ada yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang. Pendaftaran tanah aset Pemerintah Kota Padang dilakukan sesuai Permenag/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Adapun dukungan SKPD terhadap pendaftaran tanah aset Pemko yaitu dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan seluruh PNS pengelola aset di setiap SKPD dalam menginventarisir aset, agar tercatat dan terdata dengan baik. Sedangkan, dukungan dari DPRD Kota Padang terhadap pendaftaran tanah aset Pemko yaitu mengesahkan anggaran untuk pensertipikatan tanah aset dan menjalankan fungsi pengawasan dalam bidang anggaran.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Aset Pemerintah

LAND REGISTRATION OF PADANG CITY GOVERNMENT'S ASSET

**(Name: Nessa Fajriyana Farda, 1021211036, Science of Law Master Program
Faculty of Law Andalas University, 173 + xii pages, 2013)**

ABSTRACT

Asset is one of the important elements in governance and public services. Besides, asset also becomes a concern of the Indonesian Supreme Audit Institution (BPK) in terms of Financial Statement. For this four years, Padang City Government always obtain a qualified opinion (WDP) for its Financial Statement and administrative problem of asset particularly land certificate which always been a finding by BPK. Due to its important, Padang City Government need to make effort to improve the status of the land, from uncertified to be certified by conducting land registration. The problem discussed in this study are what is currently condition of physical and juridical of asset land of Padang City Government, how is the process of land registration of Padang City Government's asset, How is the support from Regional Work Unit (SKPD) and Regional Representative Council of Padang City on land registration of Padang City Government's asset. This is descriptive study. It means that this study objectively describe and explain the object under study, that is about land registration of Padang City Government's asset. As legal research, the approach used in this study is an empirical judicial approach. It means, this study look at the implementation of land registration of Padang City Government's asset and the adjusted at the fact encountered in the field. Data were collected through interview and documentation, and were analyzed by using qualitative method. The result of this study indicates that the physical and juridical condition of asset land of Padang City Government is still not clear. This is due to many of asset land do not have supporting document. Minutes Meeting on release and handover of land from public both grants and endowment are not complete yet and some are not owned by the government. Land Registration of Padang City Government's asset is conducted in accordance with Permenag/Head of BPN Number 9 Year 1999 on Procedures for Granting and Cancellation Rights of State Land and Management Rights. As for support from SKPD on land registration of Padang City Government's asset is by increasing all civil servant asset manager in each SKPD skill and knowledge in asset inventory, so that it is properly recorded. As to support from DPRD of Padang City on land registration is signing budget on asset land certification and monitoring its implementation.

Key words: Land Registration, Government's asset.